



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BAHRAN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **438908**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **364.075.000**

1. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 33.475.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 125.600.000
3. Tanah Seluas 880 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 18000 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 16515 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
7. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **341.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KIJANG SUPER KF82 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FL 125/SM SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 M/7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 288.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **33.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	419.880.064
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.158.555.064
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.158.555.064

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.